



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Analisis tata kelola pembiayaan usahatani jagung di kabupaten Pasaman Barat

Afdal Afdal^{1*)}, Endry Martius², Erwin Erwin³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Apr 27th, 2022

Revised May 20th, 2022

Accepted June 25th, 2022

Keyword:

Governance
Financing pattern
Corn farming
Economic strengthening

ABSTRACT

This study aims to describe the management pattern of corn farming financing in West Pasaman Regency and analyze problems in the management of corn farming financing in West Pasaman Regency and analyze factors related to the financing management of corn farming activities in West Pasaman Regency. The study used a simple random sampling method with a survey design. Data were collected by in-depth interviews with 8 key informants, and respondents with a questionnaire of 125 samples. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method to describe the pattern of financing management for corn farming activities, and analyze problems in the management of corn farming financing and quantitative analysis to analyze factors related to the management of corn farming financing in West Pasaman Regency by coding. (1, 2, 3 and 4) to all statements in the questionnaire. The results showed that there were 3 (tiga) patterns of sources of financing for corn farming in West Pasaman Regency, including: 1) self-financing patterns of 57.6%, 2) private financing patterns of 40.0%, and 3) government financing patterns of 57.6%. 2.4%. The use of the pattern of sources of financing for corn farming by farmers is equally good, but the pattern of self-financing tends to be more in demand by farmers, while the pattern of private and government financing is only of interest to certain farmers. The three patterns of financing corn farming, both independent, private and government patterns did not find significant problems for farmers in corn farming, either individually or in partnership. There is a strong relationship between the characteristics of farmers and sources of financing, and a strong relationship between the characteristics of farmers and farming activities at the production activity stage as well as a strong relationship between the source of financing and the stages of business activities contained in the activity and post-production stages.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Afdal, A.,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: dal.dtbungsu@gmail.com

Pendahuluan

Komoditi jagung merupakan komoditas tanaman pangan utama selain padi dan kedelai yang kegunaannya dan manfaatnya relatif luas terutama untuk konsumsi manusia, bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Dalam beberapa tahun terakhir proposi penggunaan jagung oleh industri pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan nasional. Data yang dirilis Deptan (2005) misalnya menyebutkan dalam 20 tahun ke depan, penggunaan jagung untuk pakan diperkirakan terus meningkat dan bahkan setelah tahun 2020 lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional. Pada tahun 2020 produksi jagung diperkirakan akan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan produksi jagung pakan 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung

pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton (Ditjen PKH, 2020). Besarnya nilai potensi jagung secara nasional maka dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi jagung di dalam negeri yakni melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas.

Selain melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas, upaya pengembangan jagung juga memerlukan peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, pengembangan unit usaha bersama, perbaikan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha (Deptan, 2005). Hasil penelitian Burhansyah (2006) di Kalimantan Timur menyebutkan bahwa pengembangan komoditi jagung dihadapkan pada masalah yang sangat kompleks bahkan bersifat dilematis. Pada tingkatan tertentu peningkatan produksi justru akan merugikan petani. Kendala utama karena jagung pipilan belum berkembang, disamping karena memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang lebih besar juga karena dihadapkan pada kendala pemasaran.

Berdasarkan aspek teknis, diperlukan teknologi dalam mendukung pengembangan jagung antara lain: varietas hibrida dan komposit, teknologi produksi benih sumber dan sistem perbenihannya, teknologi budidaya yang efisien dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu, dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Secara spesifik, kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan komoditi jagung adalah kebijakan pengembangan insentif investasi, kelembagaan keuangan dan permodalan, peningkatan dukungan teknologi yang siap diterapkan di lapangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan agribisnis, dukungan pemasaran, serta dukungan peraturan dan perundangan (Deptan, 2005). Sejalan dengan itu, menurut Burhansyah (2006) kebijakan pengembangan komoditas jagung nasional antara lain dapat dilakukan dengan: (1) menciptakan lingkungan strategis sosial ekonomi yang kondusif bagi pengembangan usaha, (2) memberikan dukungan fasilitas dan mendorong akselerasi pelaksanaan adopsi teknologi maju; (3) meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing; (4) meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan komoditas jagung; serta (5) memantapkan sasaran dan keberlanjutan sistem dan usaha agribisnis.

Produktivitas tanaman jagung di Indonesia belum sepenuhnya maksimal karena masih menerapkan pendekatan sederhana dan dilakukan oleh petani pada skala kecil serta lemahnya kelembagaan petani ditambah sumber pembiayaan yang belum mendukung usahatani jagung. Merujuk pendapat Kasryno, et al. (2003) instrumen kebijakan strategis sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi jagung dan pendapatan petani, karena dengan kebijakan bisnis seperti biasa (*business as usual*), laju peningkatan produksi tidak akan dapat mengimbangi laju permintaan. Selain itu kendala lain yang dihadapi petani dalam budidaya tanaman jagung diantaranya masih rendahnya penggunaan benih hibrida, kelangkaan pupuk, kelembagaan yang belum berkembang, teknologi pasca panen dan panen belum memadai dan lahan garapan sempit.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam pengembangan usahatani jagung terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh petani diantaranya adalah keterbatasan penyediaan modal, penyediaan input, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta pengelolaan usahatani jagung secara agribisnis. Pengembangan usahatani jagung menurut Pradana (2013) tidak lepas dari peranan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah sudah menetapkan rancangan program dan kegiatan bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada kelembagaan petani sebagai stimulan bagi petani.

Kompleksnya permasalahan dalam pengembangan usahatani jagung, diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keberdayaan petani dari aspek ekonomi. Salah satu pendekatan yang dinilai akan mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi petani jagung melalui pendekatan agribisnis. Konsepnya petani harus mampu mensinergikan kegiatan-kegiatan usahatani jagung dengan pendekatan agribisnis. Konsep dasar usahatani jagung berbasis agribisnis mengacu pada subsistem usahatani yang berorientasi ketersediaan input, pemasaran dan lembaga penunjang yang terintegrasi dalam suatu sistem. Dengan kata lain, peran kelembagaan dalam usahatani hanya salah satu subsistem dari sistem agribisnis yang luas dan holistik. Adapun kelembagaan agribisnis yang dimaksud dalam konteks kelembagaan petani jagung antara lain: kelembagaan petani, penyuluhan pertanian, pembiayaan usahatani dan kelembagaan pemasaran hasil (Arimbawa, 2013).

Pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan, khususnya pengembangan usahatani komoditi jagung dengan pendekatan agribisnis merupakan upaya yang sangat penting dalam mencapai tujuannya, antara lain: mendorong sub sektor tanaman pangan, menciptakan struktur perekonomian, efisien, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki pendapatan. Sedangkan menurut hasil penelitian Abidin (2013) yang menjadi kendala dalam pengembangan usahatani jagung khususnya produksi dan produktivitas adalah: masih rendahnya penggunaan varietas unggul, pengembangannya masih berfokus pada lahan kering, penerapan teknologi budidaya masih rendah, dan belum adanya pemasaran yang

jelas. Untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi petani dalam melaksanakan usahatani jagung, tidak terlepas dari dukungan pembiayaan usahatani dari berbagai sumber.

Tata kelola pembiayaan usahatani jagung perlu menjadi perhatian bagi petani dalam melaksanakan usahatani jagung. Aspek tata kelola pembiayaan usahatani jagung meliputi: aspek cara mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber, aspek bagaimana memanfaatkan pembiayaan secara tepat, efektif dan optimal pada tahapan kegiatan usahatani dan aspek bagaimana mengembalikan dan mempertanggungjawabkan pembiayaan kepada lembaga-lembaga sumber-sumber pembiayaan yang sudah diperoleh. Pengelolaan pembiayaan usahatani yang baik, diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan usahatani, meningkatkan pendapatan dan menguatkan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah pertanian, dimana pada tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 40.97% PDRB di samping sektor-sektor lainnya. Sementara sektor pertanian sendiri menyumbang sebesar 80.29% PDRB dan sub sektor tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 28.83% PDRB, dimana tanaman jagung merupakan penyumbang kedua terbesar setelah tanaman padi. Tanaman jagung menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Pasaman Barat, dimana komoditi jagung tersebar di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Menurut BPS Kabupaten Pasaman Barat (2019) pada tahun 2017 luas panen jagung Kabupaten Pasaman Barat mencapai 53.921 ha dengan produksi 340,781 Ton serta produktivitas 6.32 Ton/Ha dan pada tahun 2018 luas panen jagung mencapai 56.864 ha dengan produksi sebanyak 367.865 Ton serta produktivitas 6.47 Ton/Ha. Lokus penelitian berada di lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, yakni: Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Ranah Batahan, dimana kecamatan tersebut merupakan lima kecamatan terbesar luas tanaman dan produksi jagungnya dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

Peningkatan produksi jagung akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat petani di pedesaan dan akan mempengaruhi pengembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Menurut Hafisah (dalam Burhansyah, 2006) strategi peningkatan produksi jagung nasional dapat ditempuh melalui: peningkatan produktivitas; perluasan areal tanam; pengamanan produksi; pemberdayaan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola pembiayaan usahatani jagung dan mendeskripsikan apa saja masalah-masalah yang dihadapi petani dalam tata kelola pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat.

Sektor pertanian khususnya komoditas jagung, merupakan salah satu sektor penting dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Sebab, sektor ini mampu menyumbang produk domestik bruto (PDB) yang relatif besar. Akan tetapi, pencapaian peranan penting tersebut masih memiliki kendala, terutama dalam modal usaha. Lemahnya dukungan pembiayaan disebabkan banyak dimensi dan salah satu yang mengemuka adalah rendahnya akses ke sumber-sumber pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kloeppinger dan Sharma (2010) yang menyebutkan lembaga keuangan kurang berminat dalam pembiayaan pertanian karena empat alasan. Pertama, rumah tangga pertanian berlokasi di daerah terpencil dan tersebar sehingga dari segi biaya pelayanan menjadi tidak efektif. Kedua, pertanian skala kecil sangat rentan terhadap cuaca yang menyebabkan risiko tinggi bagi lembaga keuangan termasuk sulit untuk mendapatkan asuransi kredit pertanian. Ketiga, lembaga keuangan yang umumnya berbasis di perkotaan tidak mengetahui bisnis pertanian yang bisa mendatangkan keuntungan. Keempat, sebagian besar petani di negara berkembang berlatar belakang pendidikan rendah dan tidak banyak mengetahui bagaimana lembaga perbankan moderen beroperasi.

Senada dengan hal tersebut, menurut Saptia (2009) petani tanaman pangan memiliki beberapa permasalahan, antara lain: produk pertanian pangan tergantung musim, rata-rata produk pertanian dihasilkan di pedesaan, sehingga harus tersedia infrastruktur yang memadai, produk pertanian tanaman pangan biasanya dalam jumlah besar dan mudah busuk dan rata-rata petani tidak memiliki sertifikat tanah sebagai jaminan dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga perbankan. Saptia juga menambahkan, kelembagaan keuangan sektor pertanian di tingkat pedesaan masih jarang ditemukan, sehingga akses petani ke lembaga keuangan sangat terbatas.

Sedangkan menurut hasil penelitian Silitonga (2017), permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengembangan usahatani pangan, khususnya di sentra-sentra produksi di Indonesia adalah belum terwujudnya ragam, kuantitas, kualitas, dan kesinambungan pasokan berbagai produk pangan yang sesuai dengan dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen. Hal tersebut terkait dengan beberapa permasalahan pokok yaitu pola pemilikan lahan yang sempit dan tersebar; sistem usahatani yang kurang intensif karena lemahnya permodalan petani; stagnasi teknologi budidaya beberapa komoditas pangan; masih

relatif rendahnya tingkat efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi yang dicapai pada beberapa komoditas pangan dan lemahnya konsolidasi kelembagaan di tingkat petani.

Titik tekan yang menjadi permasalahan adalah belum optimalnya tata kelola pembiayaan usahatani jagung dan masih terdapat berbagai masalah-masalah yang dihadapi petani dalam tata kelola pembiayaan usahatani jagung. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola pembiayaan usahatani jagung dan mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi petani dalam tata kelola pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta menguatkan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam meningkatkan usahatani jagung tidak bisa terlepas dari sistem agribisnis yang melibatkan banyak stakeholders antara lain pemerintah, pihak swasta dan kelembagaan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan tata kelola pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat dan menganalisis relasi petani dan swasta (stakeholder) dalam pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyediaan bukti ilmiah. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dikaji sehubungan dengan penelitian ini Bagaimana pola tata kelola pembiayaan dalam kegiatan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat?

Metode

Penelitian dilakukan pada lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, yakni: Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Ranah Batahan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu memilih daerah penelitian berdasarkan ciri atau alasan yang dipandang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penetapan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian karena kecamatan tersebut merupakan lima kecamatan terbanyak jumlah kelompok tani dan jumlah petani jagungnya di Kabupaten Pasaman Barat. Waktu pelaksanaan penelitian tahap pertama, telah dilakukan survei pendahuluan pada Januari-Februari 2021. Penelitian tahap kedua, survei untuk mengumpulkan data kuantitatif, kualitatif dan pengamatan intensif di lapangan dilaksanakan selama Maret-Mei 2021.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan desain survei. Metode penelitian survei menurut Singarimbun (2013) adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam metode survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner, umumnya pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif kuantitatif. Eksplanatif adalah metode yang menguji hubungan antara dua peubah, apakah suatu peubah dipengaruhi secara nyata ataukah tidak oleh peubah lainnya. Kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dengan berlandaskan pada asumsi mengenai obyek empiris. Asumsi pertama bahwa obyek/fenomena dapat diklasifikasikan menurut sifat/jenis/struktur, bentuk, warna dan sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut pokok bahasan penelitian adalah tentang bagaimana tata kelola usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat, hubungan masing-masing peubah penelitian dan apasaja masalah-masalah yang dihadapi petani dalam tata kelola usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil dan Diskusi

Karakteristik Petani Jagung

Karakteristik petani adalah sifat atau ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan lingkungannya. Azwar (2003) mengatakan bahwa faktor genetik fisiologik memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap, faktor lain yang sangat menentukan pembentukan sikap adalah pengalaman. Berikut disajikan sebaran jumlah dan persentase masing-masing indikator pada peubah karakteristik petani jagung.

1. Usia

Sebagian besar petani yang menjadi responden pada penelitian ini terkategori sebagai petani dengan usia tua yakni berumur lebih dari 45 tahun dengan jumlah 70 orang atau 56 %. Petani yang terkategori muda yang memiliki kisaran umur dibawah 25 tahun sebanyak dua orang dari total 125 responden atau sekitar 1,6 %. Sementara itu petani dengan kategori usia dewasa (25-45 tahun) sebanyak 53 orang atau sekitar 42,4%. Penyebaran usia petani dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Berdasarkan tabel di atas petani di lima kecamatan yang ada di Pasaman Barat didominasi oleh petani dengan usia lanjut. Artinya, bidang pertanian belum terlalu diminati oleh kaum muda milenial.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Herlina (2002) dimana pemuda cenderung lebih muda memiliki orientasi bekerja di luar bidang pertanian karena pemuda yang lebih muda mempersepsikan pekerjaan di bidang pertanian sebagai pekerjaan yang rumit dan melelahkan, hal ini sedikit berbeda dengan petani yang memiliki usia cenderung lebih tua. Perbedaan tersebut disebabkan usia berkaitan dengan pengalaman petani di bidang pertanian. Petani yang usianya lebih tua cenderung memiliki pengalaman lebih mengenai bidang pertanian dibandingkan dengan petani yang usianya masih tergolong muda.

2. Jenis Kelamin

Dari 125 orang responden di lima kecamatan terdapat 75 orang (60%) responden laki-laki dan 50 orang (40%) responden perempuan. Dalam hal tata kelola pembiayaan usahatani, peran laki-laki dan perempuan dapat dikatakan berbeda. Laki-laki cenderung melakukan kegiatan usahatani yang membutuhkan tenaga seperti pengolahan lahan, penyemprotan hama dan melansir hasil panen. Sementara perempuan lebih cenderung melakukan kegiatan usahatani yang ringan dan tidak terlalu mengurus tenaga seperti membenih, memupuk dan memanen jagung.

Kondisi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan yang dikatakan oleh Herlina (2002) yang mana pekerjaan dalam bidang pertanian memiliki ciri-ciri di antaranya membutuhkan tenaga yang kuat, harus bekerja di bawah terik matahari, dan harus berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan tanah yang kotor. Terdapat perbedaan tenaga kerja secara seksual yang terjadi di lahan dimana keterlibatan wanita dalam proses produksi meliputi proses penanaman, penyiangan dan panen. Di lokasi penelitian, pekerjaan usahatani dominan dilakukan oleh kaum pria, wanita terlibat dalam proses penanaman dan pemupukan. Kebanyakan wanita berpikir pekerjaan pertanian dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan kekuatan fisik, alasan lainnya datang dari orang tua yang mengatakan bahwa wanita merupakan lambang kehormatan keluarga, secara fisik harus merawat diri sedangkan pekerjaan di bidang pertanian sayuran pasti berpanas-panasan di bawah matahari merupakan tugas laki-laki.

3. Pendidikan Formal

Secara umum tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan, kemampuan, dan keahlian petani dalam kegiatan usahatani yang dilakukan. Tingkat pendidikan pada penelitian ini dilihat berdasarkan tiga kategori yakni tingkat pendidikan rendah dimana petani menamatkan pendidikan dasar dan SLTP/ sederajat. Sementara tingkat pendidikan sedang dimana petani menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat dan tingkat pendidikan kategori tinggi dimana mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik Diploma, S-1, S-2 maupun S-3. Sebaran tingkat pendidikan responden kategori rendah dalam penelitian ini sebanyak 54 orang atau 43,2%, kategori pendidikan sedang sebesar 58 orang atau sekitar 46,4% dan pendidikan kategori tinggi hanya 13 orang atau 10,4%. Dari sebaran data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak petani merupakan lulusan SD, SLTP dan SLTA, sehingga tingkat pendidikan petani di lima kecamatan yang menjadi lokus penelitian dapat dikategorikan sedang. Penyebaran tingkat pendidikan petani dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Sebagian besar petani di lokasi penelitian adalah petani tradisional yang memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pengembangan usahatani yang dijalankan, karena dengan pengetahuan yang rendah petani tidak mampu melakukan inovasi yang lebih baik dalam usahatannya, meski pada kenyataannya memang terdapat sebagian petani yang berhasil walaupun berpendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Upaya meningkatkan keterampilan petani dalam usahatani maka dilakukan kegiatan seperti Sekolah Lapang (SL), penyuluhan, studi banding, studi tiru dan program lain yang bertujuan menambah keterampilan dan pengetahuan petani.

4. Luas Lahan

Luasan lahan dalam kegiatan usahatani dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat petani. Semakin luas areal lahan menggambarkan semakin tinggi produksi dan pendapatan yang diterima. Luas lahan pertanian yang dikelola dan diusahakan petani dalam kegiatan usahatani mereka sangat beragam atau memiliki varian sangat besar. Tabel 13 di bawah merupakan sebaran luas lahan petani di lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat dimana luas lahan kecil dari 0,5 Ha sebanyak 34 orang atau sekitar 27,2%, Luas lahan petani antara 0,5-1 Ha sebanyak 67 orang atau 53,6%, luasan lahan antara 1-1,5 Ha sebanyak 14 orang atau sebesar 11,2% dan luasan lahan petani besar dari 1,5 Ha sebanyak 10 orang atau sekitar 8%. Dari sebaran data tersebut dapat diketahui bahwa luas lahan yang dikelola oleh petani relatif sempit.

Luas lahan untuk komoditas jagung di Kabupaten Pasaman Barat cenderung pada skala sedang hingga sempit. Masyarakat petani di Kabupaten Pasaman Barat lebih dominan pada perkebunan kelapa

sawit. Hasil penelitian Isaac (2011) tentang efisiensi teknis produksi jagung menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari usahatani jagung adalah luas lahan usahatani jagung dan jumlah benih. Rata-rata efisiensi teknis adalah 0.961 sedangkan return to scale (RTS) adalah 0.59. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan untuk meningkatkan produksi jagung sebesar 0.39 persen dengan adanya teknologi. Dengan demikian pengaruh luas lahan terhadap kesejahteraan petani di suatu wilayah masih harus ditentukan oleh banyak faktor lain. Signifikansi pengaruh luas lahan ini juga ditentukan oleh jenis dan urgensi dari komoditas yang diusahakan serta kontribusi usaha dan komoditas lain yang diusahakan dalam menghasilkan pendapatan bagi rumah tangga petani. Kondisi yang juga penting adalah banyaknya petani di Kabupaten Pasaman Barat yang melakukan alih fungsi lahan sawah atau jagung ke perkebunan sawit.

5. Status Kepemilikan Lahan

Penguasaan lahan dan kepemilikan lahan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut Wiradi dalam Iriani (2008), status kepemilikan lahan adalah orang yang memiliki, memegang, menempati, menduduki, menggunakan atau menyewa sebidang tanah tertentu (menunjukkan penguasaan formal). Status penguasaan lahan adalah hak atas tanah atau penguasaan tanah yang pada umumnya membahas masalah pokok-pokok mengenai status hukum dari penguasaan tanah. Status kepemilikan lahan di Pasaman Barat dalam penelitian ini direpresentasikan di lima kecamatan sebagai lokasi penelitian. Pada dasarnya status kepemilikan lahan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu lahan milik pribadi dan lahan sewa dan kombinasi lahan sendiri/sewa. Dilihat pada tabel 14 terdapat 45 orang responden atau sekitar 36% merupakan petani sebagai pemilik lahan, sebanyak 26 orang atau 26% sebagai petani penggarap/sewa dan sisinya sebanyak 54 orang atau sekitar 43,2% petani sebagai pemilik dan penggarap. Untuk penggarap itu sendiri terdapat beberapa metode

Status kepemilikan lahan merupakan faktor penting bagi penduduk di pedesaan yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian. Keberagaman status kepemilikan lahan dapat mempengaruhi kemungkinan dalam proses pengelolaan lahan. Petani yang memiliki lahan sendiri lebih bebas menentukan langkah-langkah untuk lahan yang dikelolanya dibandingkan petani yang menggarap lahan milik orang lain. Berdasarkan hasil observasi di lapangan status kepemilikan lahan di lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari pemilik, penggarap dan sewa. Status kepemilikan lahan yang mendominasi di lokasi penelitian adalah status pemilik. Tingginya status pemilik menunjukkan bahwa kepemilikan lahan di lokasi penelitian masih didominasi oleh orang pribumi.

Berdasarkan hasil wawancara, petani penggarap adalah petani yang dulunya pemilik lahan berubah statusnya menjadi petani penggarap karena lahannya telah dijual kepada orang non-pribumi. Faktor lain yang menyebabkan para pemilik lahan memilih menyerahkan lahannya untuk digarap orang lain adalah, pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk bertani, pemilik lahan tidak lagi mampu menggarap lahannya sendiri dikarenakan faktor usia, pemilik memiliki pekerjaan lain seperti pegawai atau pedagang dan pemilik tidak berdomisili di Pasaman Barat. Sementara menurut Mudakir (2011) distribusi pendapatan berdasarkan status penguasaan lahan sawah yang berbeda dapat menentukan tingkat keragaman usahatani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai status kepemilikan dan pola tanam serta hubungannya dengan usahatani untuk mengetahui keragaman pendapatan petani yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan petani.

6. Mengembangkan Keterampilan

Hasil pengolahan data menjelaskan bagaimana petani mengembangkan keterampilan berusahatani mereka. Dari 125 responden sebanyak 45 orang atau 36% melakukan kegiatan usahatani berdasarkan pemahaman dan pengetahuan sendiri. Pada level ini petani hanya berdiskusi atau bertanya kepada orang-orang terdekat yang pernah membudidayakan jagung. Selain itu, empat orang (3,2%) petani mengembangkan keterampilan dengan membaca literatur atau referensi terkait dengan budidaya jagung, khususnya aplikasi pupuk dan pemilihan benih yang tepat.

Pada level ini salah satunya menonton kanal-kanal youtube yang bertemakan budidaya jagung. Sebanyak 24 responden atau sekitar 19,6% petani mendapat pembinaan dari penyuluh dalam rangka meningkatkan keterampilan berusahatani jagung dan terakhir sebanyak 52 petani atau sekitar 41,6% petani mengembangkan keterampilan berusahatani melalui kombinasi antara pengetahuan sendiri, membaca atau menonton referensi serta pembinaan dari penyuluh. Tabel 15 berikut sebaran petani dalam mengembangkan keterampilan dalam budidaya jagung.

Terkait dengan kategori kedua tentang rendahnya interaksi petani dalam memanfaatkan media pembelajaran maka perlu tinjauan atau kajian lebih jauh. Saat ini media pembelajaran telah banyak memberi peluang untuk mengembangkan cara-cara atau praktik budidaya baik dalam hal pengolahan

lahan, pemupukan, pemeliharaan, hingga perlakuan pasca panen. Menurut Khairil (1994) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan media massa dapat memenuhi kebutuhan petani terhadap informasi, pengetahuan serta hiburan. Pengguna media massa tersebut mempengaruhi cakrawala berpikir, sikap, dan akhirnya mempengaruhi perilaku petani.

Pada kategori ketiga juga menjadi sorotan dimana peran lembaga penyuluh perlu ditingkatkan untuk dapat mengembangkan keterampilan petani. Dalam hal ini sosialisasi lembaga penyuluh baik dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian maupun penyuluh swadaya sangat diharapkan perannya. Jika merujuk pada pendapat Ihromi (1999), sosialisasi merupakan suatu proses transmisi kebudayaan antargenerasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak dapat bertahan melebihi satu generasi. Syarat penting berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi, karena tanpa adanya interaksi tidak mungkin adanya proses sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana seseorang belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Merujuk pada hasil penelitian Ardila dan Eriyanti (2019) bertajuk Bentuk Pemberdayaan Petani Jagung di Nagari Kataping oleh Stakeholders dilakukan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan ini dilakukan secara berkelompok tentang bagaimana pemberian pupuk yang baik terhadap tanaman jagung dan pemberian bantuan bibit jagung terhadap petani jagung. Pelatihan dan pendampingan ini dimulai dari budidaya jagung dengan contoh bagaimana pembibitan jagung yang baik, penanaman jagung yang baik, serta pemberian obat-obatan pada jagung. Pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat petani jagung dapat meningkatkan pendapatan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai cara bertanam jagung yang baik.

7. Motivasi Berusahatani

Dorongan dapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. Perilaku yang ditunjukkan tersebut selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai suatu kepuasan. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan sebaran angka motivasi petani dalam melakukan kegiatan usahatani. Sebanyak 7 (tujuh) atau sekitar 5,6% responden menjawab dorongan untuk budidaya jagung karena faktor kebiasaan. Sebanyak 86 orang responden atau sekitar 68,8% menyebut alasan mereka melakukan budidaya jagung karena faktor kebutuhan dan 6 (enam) orang responden menjawab karena faktor bisnis. Sisanya, sebanyak 26 orang petani atau sekitar 20,8% didorong oleh kebiasaan, kebutuhan dan bisnis.

Terkait dengan motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi petani di Kabupaten Pasaman Barat dalam berusahatani jagung lebih dominan dipengaruhi oleh kebutuhan. Selain itu ada juga petani yang melakukan budidaya jagung karena faktor ketiganya. Toge atau pengepul rata-rata memiliki area lahan yang ditanami jagung. Menurut penuturan mereka, ada keuntungan yang berlebih ketika menanam jagung dan memasarkannya sendiri. Hal ini sesuai dengan paparan Iskandar (2002) yang mengatakan bahwa motivasi keberhasilan muncul dengan adanya kebutuhan dan keinginan. Kedua hal tersebut mempengaruhi perilaku sehingga timbul dorongan-dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil penelitian Widiyanti (2016) menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam penerapan inovasi benih jagung hibrida yaitu pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan garapan, sifat kosmopolit dan ketersediaan modal. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh yaitu umur, pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana serta intensitas penyuluhan.

Pola hubungan antara karakteristik petani jagung dengan sumber-sumber pembiayaan usahatani jagung dapat dilihat dengan menganalisis peubah-peubah karakteristik petani dengan sumber-sumber pembiayaan usahatani jagung dengan menggunakan analisis tabulasi silang. Adapun sebaran jumlah dan persentase karakteristik petani yang menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam kegiatan usahatani jagung.

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui tabulasi silang diketahui sebaran usia petani yang menggunakan sumber pembiayaan lebih banyak pada kategori usia dewasa (25-45 tahun). Dari tabel di atas diketahui bahwa petani menggunakan pembiayaan mandiri pada kategori usia dewasa sebanyak 32 orang (25,6%), usia tua (>45 tahun) sebanyak 40 orang (32%) dan tidak ada petani usia muda (<25 tahun) yang menggunakan pembiayaan mandiri. Sementara dari sumber pembiayaan dari swasta, sebanyak 8 orang (6,4%) pada kategori usia dewasa, usia tua sebanyak 10 orang (8%) dan tidak ada petani usia muda (<25 tahun) yang menggunakan pembiayaan swasta. Pembiayaan dari pemerintah diketahui kecil dari 3% baik untuk kategori usia muda, dewasa maupun usia tua. Terakhir didapat

kesimpulan bahwa sebanyak 2 orang (1,6%) pada usia muda, sebanyak 12 orang (9,6%) pada usia kategori dewasa dan sebanyak 15 (12%) yang menggunakan kombinasi pembiayaan dari mandiri, swasta dan pemerintah.

Dari hasil tabulasi silang diketahui juga diketahui sebaran pendidikan petani yang menggunakan pembiayaan mandiri pada kategori pendidikan rendah (tamat SD) yakni sebanyak 35 orang (28%), sebanyak 29 orang (23,2%) pada pendidikan kategori sedang (tamat SLTP-SLTA) dan ada 8 orang petani pada pendidikan kategori tinggi (tamat PT) yang menggunakan pembiayaan mandiri. Tabel di atas menjelaskan bahwa petani menggunakan pembiayaan swasta pada kategori pendidikan rendah sebanyak 10 orang (8%), pendidikan sedang sebanyak 6 orang (4,8%) dan pendidikan tinggi sebanyak dua orang (1,6%). Sementara dari sumber pembiayaan dari pemerintah, diketahui kecil dari 3% baik untuk kategori pendidikan rendah, sedang dan tinggi. Terakhir diketahui sebanyak 8 orang (6,4%) pendidikan rendah, sebanyak 20 orang (16%) pada pendidikan sedang dan sebanyak 1 (0,8%) yang menggunakan kombinasi pembiayaan dari sumber mandiri, swasta dan pemerintah.

Dari luas lahan garapan petani juga dapat ditarik kesimpulan bahwa petani yang mempunyai luas lahan kecil dari 0.5 dan 0.5 -1 Ha cenderung menggunakan sumber pembiayaan mandiri, sementara petani yang memiliki luasan lahan besar dari 1 Ha cenderung menggunakan pembiayaan swasta dan pemerintah. Beberapa petani menggunakan kombinasi pembiayaan dari mandiri, swasta dan pemerintah dalam kegiatan usahatani jagung. Hal yang sama juga berlaku pada indikator status kepemilikan lahan dimana petani yang berstatus pemilik dan penggarap lebih cenderung memanfaatkan pembiayaan mandiri. Hal ini berbeda dengan petani yang menyewa lahan yang mana mereka cenderung lebih memanfaatkan sumber pembiayaan dari pihak luar dan juga kombinasi antara sumber pembiayaan mandiri, swasta dan pemerintah. Di lapangan ditemui, sumber pembiayaan dari pemerintah lebih banyak dalam bentuk sarana produksi dan alat mesin pertanian.

Sumber Pembiayaan Usahatani Jagung

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021, dimana struktur pembiayaan usahatani jagung ini adalah pembiayaan usahatani jagung yang disusun dengan menghimpun standar input dari beberapa kecamatan. Struktur pembiayaan usahatani jagung tersebut meliputi: 1) pekerjaan pendahuluan/awal (pemberihan lahan), pengolahan tanah (bajak, dolomit dan pengendalian gulma), penanaman (tugal dan membenih), pemeliharaan (pengendalian gulma, pemupukan dan pengendalian gulma), dan panen/panen pasca panen (penumbangan, pengupasan dan pengumpulan hasil).

Berdasarkan sebaran jumlah dan frekuensi sumber pembiayaan diketahui pola sumber pembiayaan lebih dominan menggunakan pembiayaan mandiri yakni sebanyak 72 orang (57,6%). Sementara petani yang menggunakan biaya dari pihak swasta (bank, toke, koperasi) dalam kegiatan usahatannya sebanyak 50 orang responden (40,4%), dan sisanya sebanyak 3 orang (2,4%) menerima dukungan dari pemerintah.

1. Pembiayaan Mandiri

Petani yang menggunakan pembiayaan mandiri untuk keperluan usahatani jagung mulai dari Saprodi dan biaya tenaga kerja. Melalui pembiayaan mandiri, petani dapat lebih leluasa menggunakan pembiayaan tanpa harus memikirkan cara untuk mengembalikan. Berbeda dengan pembiayaan di luar petani, dimana mereka harus memikirkan bagaimana cara mengembalikan pembiayaan melalui hasil usahatani yang dilakukan. Ketika mengalami gagal panen atau hasil penjualan jagung tidak sesuai maka petani harus menyicil pinjaman dari pihak luar. Kondisi ini sesuai kondisi di lapangan dimana petani memilih mengusahakan pembiayaan secara mandiri dengan alasan tidak mau dibebani hutang dalam jangka waktu lama.

Hasil penelitian Rohi (2019) menyebutkan bahwa lembaga keuangan merupakan bantuan dalam mengakses kredit petani dalam melakukan usahatani yang memiliki nilai positif dan tidak berpengaruh secara nyata. Tetapi petani yang mengakses kredit dapat menurunkan tingkat inefisiensi teknis pada usahatani jagung. Namun demikian, petani yang mengakses kredit dapat menurunkan tingkat inefisiensi teknis pada usahatani jagung. Hal ini dikarenakan dengan adanya akses kredit petani dapat memperoleh modal untuk membeli input usahatani dan melakukan usahatani sehingga dapat memperoleh hasil produksi yang maksimal dan lahan yang diusahakan oleh petani jagung yang relatif lebih luas lebih dari 1 hektar. Kondisi ini menurut Rohi membutuhkan modal yang besar dan petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0.5 hektar akan melakukan kredit dengan tujuan yang sama, tetapi adapun tujuan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder dalam rumah tangga. Situasi serupa juga terjadi di lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai contoh ditemukan

di lapangan, petani cenderung lebih loyal dalam pemberian pupuk karena telah di-support secara penuh oleh toke atau pengepul.

2. Pembiayaan Swasta

Sebaran pembiayaan dari pihak swasta dilihat dari jenis pembiayaan yang diberikan tergambar peran toke atau pengepul yang lebih dominan dibandingkan pinjaman dari bank yang bersifat pinjaman kredit atau dari lembaga swasta non keuangan lainnya yang menerapkan pinjaman bergulir. Dari data pada tabel di atas dapat dinarasikan bahwa jenis pembiayaan yang diberikan pihak swasta dikategorikan dalam bentuk kredit, bergulir dan sistem toke atau pengepul. Mengingat sumber pembiayaan lebih banyak berasal dari toke maka mekanisme pinjaman baik prosedur waktu, jumlah, suku bunga dan metode pengembalian petani bersifat fleksibel. Artinya, pinjaman untuk pembiayaan usahatani jagung ke toke tidak memiliki standar baku sebagaimana yang diterapkan pada lembaga seperti koperasi atau bank. Beberapa petani yang menggunakan pembiayaan swasta jenis pembiayaan bersifat kredit dengan menerapkan prosedur peminjaman, jangka waktu, jumlah pinjaman, suku bunga dan metode pembayaran dalam hal lain yang disepakati kedua belah pihak.

3. Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah adalah segala bentuk bantuan yang bersumber dari pemerintah baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Dalam tata kelola pembiayaan, peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan lebih kepada penyediaan Saprodi ke pada kelompok tani. Maka, petani yang belum atau tidak tergabung dalam kelompok tani tidak akan mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah. Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan melalui program atau kegiatan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Merujuk pada pendapat Pasaribu dan kawan-kawan (2007) dalam kajian mereka terkait bantuan pembiayaan pemerintah dalam kegiatan usahatani jagung disimpulkan bantuan dan fasilitasi pemerintah masih terus dibutuhkan. Fasilitasi tersebut dapat berbentuk: (a) sertifikasi lahan untuk memenuhi persyaratan agunan agar petani, (b) pembinaan petani/kelembagaan petani yang lebih intensif untuk mencapai level “mampu” pada aspek manajerial usaha, c) introduksi inovasi teknologi (hulu-hilir) yang adaptif terhadap perubahan iklim, (d) pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, (e) ketersediaan sarana produksi tepat waktu dengan biaya terjangkau, (f) melakukan pengawasan dan pendampingan yang intensif dengan fungsi dan peran penyuluhan pertanian, serta (g) membantu kegiatan pemasaran dengan keterjangkauan pada lembaga keuangan. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah biasanya berupa Saprodi yang diberikan berdasarkan ada atau tidaknya program pemerintah dan biasanya tidak mengikat.

Bentuk bantuan dari pemerintah bagi usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat berupa bantuan Saprodi dan Alsintan yang sifatnya hibah lepas. Pemerintah tidak mengganggu pembiayaan bergulir berupa uang tunai. Namun, akses untuk mendapat bantuan menurut petani di lima kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat belum merata karena hanya sebagian kelompok tani saja yang mendapat akses ke program pemerintah. Saat ini, Kementerian Pertanian memfasilitasi bantuan modal melalui kegiatan Hibah Kompetitif bagi kaum muda yang berminat berwirausaha di bidang pertanian dan belum mendapatkan akses perbankan untuk mengembangkan serta mengelola usahanya. Hibah Kompetitif ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan bagi pemuda di perdesaan untuk mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan pertanian.

4. Pembiayaan Pengolahan Lahan

Pengolahan lahan merupakan bagian dari kegiatan usahatani jagung, dimana kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam upaya meningkatkan produksi. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan tabulasi silang diperoleh gambaran sebanyak 121 orang responden atau sebesar 96,8% petani mengolah lahan dari biaya secara mandiri. Sementara, sebanyak 4 orang responden atau sekitar 3,2% petani mengolah lahan dari pembiayaan swasta. Sementara itu tidak ada dukungan pembiayaan dari pemerintah dalam pengolahan lahan. Melalui observasi di lapangan dapat digambarkan pengolahan lahan dan pengembangan lahan untuk usahatani jagung dilakukan dengan bekerjasama dengan petani lain dalam bentuk gotong-royong dan arisan bergilir.

Pada kondisi ini petani biasanya kerjasama antar anggota keluarga untuk meringankan biaya. Kondisi lain ditemukan dimana petani saling berkerja sama dengan anggota keluarga dengan mekanisme bagi hasil. Menurut salah seorang petani yang melakukan pengembangan lahan dengan cara menyewa lahan, biasanya lahan yang disewa adalah bekas lahan sawit plasma yang masuk pada fase replanting. Harga sewa lahan bekas sawit berkisar antara Rp.20-40 Juta/2 Ha untuk 7-8 kali tanam. Harga tersebut biasanya satu paket dengan pembiayaan replanting kepala sawit.

5. Pembiayaan Sarana Produksi

Sementara dilihat dari besar pembiayaan yang dialokasikan petani yang bersumber dari swasta dapat dilihat sebarannya dimana sebanyak 37 orang responden (29,6%) dari 53 orang responden mengalokasikan biaya kurang dari Rp. 3 Juta untuk sekali tanam. Sebanyak sembilan orang responden (7,2%) petani mengalokasikan anggaran antara Rp. 3-4 Juta untuk satu kali tanam dan dua orang responden (1,6%) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4-5 Juta untuk satu kali tanam. Sisanya sebanyak lima orang menghabiskan biaya lebih dari Rp. 5 juta untuk satu kali tanam.

6. Pembiayaan Upah/Tenaga Kerja

Tenaga kerja untuk usahatani jagung bersumber dari dalam dan luar keluarga. Umumnya tenaga kerja dalam keluarga lebih besar perannya dalam aktivitas usahatani sedangkan tenaga kerja luar keluarga hanya digunakan untuk aktivitas tertentu jika diperlukan misalnya saat penyiapan lahan dan pembersihan sekaligus pembumbunan pohon jagung. Kebutuhan tenaga kerja luar keluarga erat hubungannya dengan luas lahan yang diusahakan dan ketersediaan dana petani untuk mengupah tenaga kerja ataupun tersedianya kelompok kerja dan kelembagaan kerja gotong royong di desa. Sumber tenaga kerja di lima wilayah ini dari kalangan petani (tenaga dalam keluarga) dan luar keluarga, baik secara perorangan, kelompok kerja permanen/non permanen dan gotong royong.

Tahapan Kegiatan Usahatani Jagung

Berdasarkan tabel di bawah dapat digambarkan pembiayaan tenaga kerja pada kegiatan usahatani yang dilakukan. Sebanyak 97 orang responden (77%) memanfaatkan pembiayaan untuk empat tahapan usahatani yakni pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen. Sementara sebanyak tiga orang responden (2,4%) menggunakan pembiayaan untuk upah tenaga kerja pada tahap pengolahan lahan. Sebanyak 10 orang responden (8%) menggunakan pembiayaan untuk tahap penanaman, delapan orang responden (6,4%) menggunakan pembiayaan untuk fase pemeliharaan dan sebanyak tujuh responden (5,6%) khusus mengalokasikan pembiayaan untuk tahap pemanenan.

Dari aspek tata tanam, penanaman jagung di lahan kering tidak menggunakan pengairan teknis atau penyiraman secara rutin. Sumber air bagi tanaman adalah air hujan dan diperoleh pada musim hujan. Karena itu petani di Pasaman Barat biasanya menanam sebelum musim hujan, dengan perhitungan setelah tanaman tumbuh barulah datang hujan, biasanya sebulan sebelum musim hujan barat sehingga tanaman tidak tumbang. Menurut hasil wawancara dengan petani, jika jagung ditanam setelah musim hujan atau menunggu hujan, maka hasil panennya kurang bagus (bibit rusak dan hasilnya rendah). Menurut mereka penanaman dilakukan saat tanah telah lembab sehingga dapat ditanami. Perbedaan tipe agroklimat di beberapa wilayah di Pasaman Barat memberikan implikasi yang berbeda terhadap sistem pertanian jagung yang dikembangkan.

Terkait tahapan pemeliharaan, dari hasil pengolahan data didapatkan tahapan yang dilakukan petani dalam kegiatan usahatani mereka. Dari 125 responden sebanyak 118 orang (94,4%) menjawab melakukan tiga tahapan pemeliharaan yakni pengendalian gulma, pemupukan dan pengendalian HPT. Sebanyak lima orang atau sekitar 4% petani hanya melakukan pengendalian HPT tanpa melakukan tahapan pemeliharaan yang lain. Sementara terdapat masing-masing satu orang (0,8%) yang hanya melakukan pengendalian gulma dan pemupukan. Sementara tidak ada responden yang melakukan pengairan dalam budidaya tanaman jagung.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan petani jagung di hampir semua kecamatan di Pasaman Barat diawali dengan pengolahan lahan. Tahap pengolahan lahan biasanya dilakukan dengan pembersihan rumput dan gulma dengan herbisida. Penyemprotan rumput dan gulma dengan herbisida dilakukan antara dua hingga kali, tergantung ketebalan gulma dan pengaruh cuaca. Setelah lahan telah bersih akan dilakukan penanaman. Praktik menanam biasanya menggunakan tugal secara manual dan juga menggunakan tugal roda. Menurut petani penanaman menggunakan tugal lebih menguntungkan karena daya tumbuh jagung lebih besar dibandingkan dengan penanaman dengan tugal roda.

Tahap selanjutnya ialah pemupukan yang biasanya dilakukan antara 1-3 kali. Untuk skema pemupukan satu kali biasanya pemupukan pertama dilakukan saat jagung berumur kurang dari 10 hari, kemudian pemupukan kedua pada jagung berumur 30-35 hari dan pemupukan ketiga saat jagung berumur lebih dari 40 hari. Pada skema pemupukan dua kali, pemupukan pertama dilakukan saat jagung berumur 15-20 hari dan pemupukan kedua pada jagung umur 40 hari. Pada kondisi tertentu petani kadang hanya melakukan satu kali pemupukan yakni saat jagung berumur tiga minggu. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan dimana tahap ini tidak membutuhkan pembiayaan dan tenaga. Namun, pada kondisi lahan yang banyak hama babi atau kera, petani biasanya melakukan kontrol rutin pagi dan sore hari untuk memastikan tanaman tidak diganggu hama babi atau kera. Selanjutnya panen dan pasca panen dimana dalam pasca panen menggunakan alat pemipil sudah umum digunakan petani. Pengeringan hasil panen masih mengandalkan sinar matahari dan jika jagung yang dipanen pada musim hujan kualitasnya rendah karena serangan jamur.

1. Kegiatan Pra Produksi

Kegiatan praproduksi dalam penelitian ini salah satunya pengolahan lahan. Dari pengolahan data didapatkan hasil dimana petani lebih dominan yakni 91 orang atau sekitar 72,8% tanpa melakukan pengolahan tanah (TOT). Sebanyak 25 orang atau sekitar 20% melakukan pengolahan tanah sebelum menanam dan sisanya sebanyak sembilan orang atau sekitar 7,2% melakukan semi olah tanah dengan cara memaler atau membajak pada titik tanam. Praktik ini cukup banyak dilakukan petani di Pasaman Barat.

Terkait dengan pemanfaatan dukungan pembiayaan pada tahap praproduksi ini dapat dijelaskan bahwa sebanyak 72 orang petani (57,6%) mengolah lahan menggunakan sumber pembiayaan mandiri. Sementara terdapat 18 orang petani (14,4%) yang mengolah lahan dengan bantuan swasta, sebanyak 6 orang (4,8%) memanfaatkan dukungan pemerintah dan terdapat 29 orang petani yang melakukan tahapan praproduksi dengan mengkombinasikan tiga sumber pembiayaan baik mandiri, swasta dan pemerintah. Kombinasi sumber penyediaan Saprodi ini lebih dipengaruhi faktor luas lahan yang lebih dari dua hektar karena komponen pembiayaan Saprodi yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan luas lahan garapan yang sempit.

Hasil wawancara dengan sejumlah petani di lapangan terkait penyiapan lahan, rata-rata petani mengolah secara sempurna, namun ada pula yang tanpa olah tanah. Penyiangan dilakukan secara manual (cangkul, bajak ternak) atau dengan herbisida. Ada beberapa pertimbangan petani melakukan praktik TOT antara lain: karena ketebalan tanah didaerah mereka cukup dalam sehingga petani langsung menanam menggunakan tugal atau mesin tanam semi manual berupa mesin kletek. Selain itu, pertimbangan menghemat biaya juga mempengaruhi petani menerapkan sistem TOT.

2. Kegiatan Produksi

Dalam penelitian ini, kegiatan pada tahap produksi meliputi tahap pemeliharaan yang mana terkait dengan ketersediaan Saprodi, Alsintan dan biaya upah. Dari tabel di atas disajikan sebaran kontribusi sumber pembiayaan dalam tahapan kegiatan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat. Sebanyak 91 orang atau 72,8% petani melakukan kegiatan pada tahap produksi menggunakan sumber pembiayaan secara mandiri. Artinya, semua biaya mulai dari penanaman dan pemeliharaan menggunakan sumber biaya sendiri. Sementara, 9 orang atau sekitar 7,2% petani mengandalkan dukungan pihak swasta pada tahap kegiatan produksi. Sementara itu kontribusi dukungan yang ber sumber dari pemerintah untuk tahap produksi dimanfaatkan sebanyak 25 orang petani (20%) jagung.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tahap produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, lahan, tenaga kerja, serta akses transportasi merupakan hal yang krusial. Hilangnya salah satu bagian dari Saprodi akan sangat berpengaruh pada produktivitas hasil. Selain bentuk dan jenis Saprodi yang digunakan dalam usahatani jagung pertimbangan lain yang diutarakan Rukka (2003) adalah terpenuhinya jumlah, mutu, harga, dan waktu yang tepat. Komponen ini akan sangat menunjang keberhasilan usahatani, serta adanya lembaga keuangan dapat memberikan pelayanan terhadap petani terkait dengan akses modal. Kaitannya dengan penelitian ini komponen jumlah, mutu, harga dan waktu yang tepat terkait erat dengan modal dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan sejumlah petani, tahapan produksi tidak menjadi permasalahan, kecuali terjadinya kelangkaan stok pupuk pada waktu-waktu tertentu. Artinya, banyak kios pertanian yang menyediakan Saprodi untuk usahatani jagung. Kendala utama biasanya terkait dengan modal pembiayaan. Maka, pada tataran ini peran toke atau pengepul dinilai sangat penting dalam menyediakan Saprodi bagi petani. Kelebihan dari adanya toke bagi petani adalah mampu menyediakan Saprodi bagi kebutuhan petani tanpa melalui prosedur yang sulit. Hubungan antara petani jagung dan toke biasanya terbangun dari kebutuhan petani dan kesediaan toke dan pengepul untuk memenuhi kebutuhan petani jagung dalam hal ketersediaan Saprodi.

Merujuk pada pendapat Purwanto (2007) yang menyebut upaya peningkatan produksi jagung antara lain dapat ditempuh melalui penyebaran benih unggul hibrida dan komposit unggul, perluasan areal tanam dan penambahan luas baku lahan kering, pengamanan produksi atas gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, peningkatan produksi juga dipengaruhi dampak perubahan iklim dan menekan kehilangan hasil saat panen dan pascapanen. Dari segi kelembagaan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan agribisnis di tingkat petani, kelembagaan usaha dan pemerintah sesuai peran masing-masing dan pembiayaan dalam pengembangan produksi jagung. Peran Secara khusus peran pemerintah dapat dilakukan melalui bantuan benih jagung hibrida, pengadaan sarana

pupuk bersubsidi dan pembinaan melalui penguatan modal usaha, pendampingan teknologi, fasilitasi kredit pertanian, dan program pengembangan jagung melalui kemitraan usaha.

Silitonga (2017) menyatakan hal yang senada dimana peningkatan produktivitas jagung dapat dilakukan melalui dua cara yaitu mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru serta menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Teknologi menurut Silitonga merupakan bagian dalam pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani karena teknologi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses produksi. Semakin baik petani dalam mengadopsi teknologi maka semakin efektif kegiatan yang dilakukan dan semakin tinggi pula produktivitas hasil yang didapat.

Merujuk data yang dikeluarkan BPS (2017) nilai produksi dan biaya produksi per musim tanam per hektar budidaya tanaman jagung sebesar Rp. 4.188.000, dengan rincian Rp. 14.385.000 produksi dan Rp. 10.197.000, - ongkos produksi. Jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani jagung di Pasaman Barat maka dapat dikatakan berimbang dengan rata-rata pendapatan petani secara nasional. Besar kecilnya pendapatan petani ini juga dipengaruhi oleh banyak hal terutama harga jual. Saat pengumpulan data dilakukan harga jual jagung termasuk kategori tinggi dimana mencapai Rp.4.000-Rp.4.500 per/Kg di level toke (pengepul).

Mengutip pendapat Fajar (2014) yang menyebutkan pembentukan koperasi sebenarnya merupakan alternatif untuk menyalurkan jagung langsung kepada konsumen sehingga petani mendapatkan informasi mengenai kualitas yang diinginkan oleh konsumen, namun koperasi yang dibentuk memiliki kelemahan yaitu keterbatasan modal. Walaupun harga pembelian kepada petani lebih tinggi dibandingkan pedagang desa, tapi tidak semua petani dapat menjual jagung kepada koperasi dan koperasi sendiri menerapkan aturan yang ketat untuk petani bila ingin menjadi anggotanya. Padahal, adanya koperasi dapat memperpendek saluran pemasaran sehingga margin pemasaran antara petani dan konsumen bisa lebih rendah.

3. Kegiatan Pasca Produksi

Hasil pengolahan data terkait kegiatan pascaproduksi yang salah satunya meliputi pemasaran hasil jagung. Dari hasil tabulasi silang tahapan dalam kegiatan pascaproduksi yang menggunakan dukungan sumber pembiayaan didapatkan hasil bahwa sebanyak 50 orang petani (40%) menggunakan pembiayaan mandiri, sedangkan 60 orang (48%) memanfaatkan sumber dari swasta dan sisanya sebanyak 15 orang (12%) memanfaatkan dukungan dari pemerintah. Sementara jika dilihat dari pemasaran hasil didapatkan sebanyak 59 orang responden atau sekitar 47,2% menjual hasil panennya secara mandiri. Artinya, petani leluasa menjual ke pengepul atau toke yang secara kisaran harga beli lebih tinggi. Sementara 65 orang petani atau sebesar 52% menjual ke pengepul atau toke jagung karena telah ada kontrak penjualannya yang dilakukan sebelumnya. Dan, sisanya, satu orang atau 0,8% menjual hasil panennya secara kolektif dengan beberapa orang petani lainnya.

Perbedaan mendasar antara penjualan sendiri dan melalui toke terletak pada kebebasan atau keleluasaan petani menentukan tempat mereka menjual hasil panennya. Di lapangan ditemukan bahwa petani yang tidak terikat pembiayaan dengan toke atau pengepul, bisa memilih toke atau pengepul yang membeli dengan harga tinggi. Sementara bagi petani yang sebelumnya terikat pembiayaan dengan toke atau pengepul akan menjual ke toke atau pengepul yang membantu petani dalam pembiayaan baik itu pembiayaan upah, Saprodi, Alsintan atau biaya lainnya. Kelemahannya pada model penjualan yang terikat kontrak dengan pengepul atau toke, petani tidak dapat menjual kepada toke lain yang harga belinya lebih tinggi.

Dari hasil wawancara di lapangan, petani mengungkapkan model pemasaran melalui toke sebenarnya merugikan petani karena tidak diberi pilihan untuk mendapatkan harga yang sesuai pasaran. Artinya, harga beli toke atau pengepul telah lebih rendah dari harga standar yang berlaku di pasaran. Biasanya selisih harga antara model pemasaran melalui toke dan pemasaran sendiri berkisar Rp.200-Rp.300 per/Kg. Kendala lain yang dihadapi petani dengan model pemasaran melalui toke adalah tidak adanya jaminan kesesuaian tonase karena petani sepenuhnya menyerahkan kepada toke atau pengepul.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka didapatkan beberapa kesimpulan adalah (1) Pola pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat, terdiri dari 3 (tiga) pola: 1) pola pembiayaan bersumber dari petani/mandiri sebanyak 57.6 %, 2) pola pembiayaan bersumber dari swasta sebanyak 40.0 %, 3) pola pembiayaan bersumber dari pemerintah sebanyak 2.4 %.

dan 3) pola pembiayaan bersumber dari pemerintah sebanyak 2.4 %. Pola-pola pembiayaan usahatani jagung tersebut, petani dalam hal pemanfaatannya sama baiknya. Namun pola pembiayaan bersumber petani mandiri dalam kegiatan usahatani jagung lebih cenderung banyak diminati oleh petani. Sedangkan pola pembiayaan swasta dan pola pembiayaan pemerintah hanya cenderung diminati oleh petani tertentu. (2) Pola pembiayaan usahatani jagung di Kabupaten Pasaman Barat yang bersumber dari pembiayaan mandiri, pembiayaan swasta dan pembiayaan pemerintah tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam melaksanakan kegiatan usahatani jagung, baik secara mandiri maupun kemitraan. (3) Adanya hubungan yang kuat antara karakteristik petani dengan sumber pembiayaan ditandai beberapa perubahan karakteristik petani memiliki hubungan nyata pada kontribusi ketiga sumber pembiayaan. Hubungan yang kuat antara karakteristik petani dengan tahapan kegiatan usahatani hanya terdapat pada tahapan kegiatan produksi. Sedangkan hubungan yang kuat antara sumber pembiayaan dengan tahapan kegiatan usahatani terdapat pada tahapan kegiatan produksi dan pasca produksi.

Referensi

- Departemen Pertanian. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Burhansyah, R. 2006. Pengembangan Agribisnis Berbasis Jagung kawasan Usaha Agribisnis Terpadu Sanggau Ledo Kabupaten Bengk. Jurnal HUMANITY, Volume 1 Nomor 1 September 2006: 87 -95.
- Arimbawa, P. 2013. Peran Kelembagaan Agribisnis dalam Usahatani Kakao Jurnal AGRIPUS, Volume 23 Nomor: 03 September 2013, ISSN 0854-0128.
- Kloppinger, TR., Sharma, M. 2010. Innovations in Rural and Agriculture Finance, Overview. For Food, Agriculture, And the Environment Focus 18. Brief. July 2010
- Saptia, Y. 2009. Efektivitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian. [internet]. [diunduh 2020 Jan 28]. Tersedia pada: <http://perpustakaan.ekonomi.lipi.go.id>.
- Silitonga, PY. 2017. Pengaruh Pengelolaan Tanaman Terpadu terhadap Efisiensi Produksi dan Ketahanan Pangan Petani di Sentra Produksi Jagung Provinsi Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun, M., Effendi, S. 2013. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Azwar, S. 2003. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herlina. 2002. Orientasi Nilai Kerja Pemuda pada Keluarga Petani Perkebunan [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Isaac, O. 2011. Technical efficiency of maize production in Oyo State. Journal of Economics and Internasional Finance. 3(4): 211-216.
- Iriani, AY. Distribusi Kepemilikan Lahan Pertanian dan Sistem Tenurial di Desa Kota (Kasus Desa Cibatoak 1, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Mudakir, B. 2011. Produktivitas lahan dan distribusi pendapatan berdasarkan status penguasaan lahan pada usahatani padi (kasus di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. 1(1):75.
- Khairil, 1994. Hubungan Keterdedahan Petani Anggota Kelompok Pencapir Pada Siaran Pedesaan dari Radio dan Televisi dengan Pengetahuan Mereka tentang Diversifikasi Usahatani di Kabupaten Bengkalis Utara [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ihromi, TO. 1999. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Obor Indonesia. Jakarta.
- Ardila, D., Eriyanti, F. 2019. Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. JESS (Journal of Education on Social Science) Vol 3: 2 October 2019, Hal. 31-44.
- Iskandar, O. 2002. Etos Kerja, Motivasi, dan Sikap Inovatif Terhadap Produktivitas Petani. Makara, Sosial Humaniora. 6 (1).
- Widiyanti, 2016. Kinerja Usahatani dan Motivasi Petani dalam Penerapan Inovasi Benih Jagung Hibrida pada Lahan Kering di Kabupaten Lombok Timur [tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rohi, JG. 2019. Analisis Efisiensi dan Pendapatan Usahatani Jagung di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur [Tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Pasaribu, SM., B. Sayaka, W.K. Sejati, A. Setyanto, J. Hestina, dan J. Situmorang. 2007. Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian. Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Bogor.
- Purwanto, S. 2007. Perkembangan Produksi dan Kebijakan dalam Peningkatan Produksi Jagung. hal. 456–473. Dalam Sumarno et al. (Ed.). Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan-nya. Pusat Penelitian

- dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Silitonga, PY. 2017. Pengaruh Pengelolaan Tanaman Terpadu terhadap Efisiensi Produksi dan Ketahanan Pangan Petani di Sentra Produksi Jagung Provinsi Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Tahun 2016-2017. Kabupaten Pasaman Barat.
- Fajar, AI. 2014. Analisis Rantai Pasok Jagung di Provinsi Jawa Barat [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.